

PENGANTAR REDAKSI

Krisis moneter berkepanjangan sejak pertengahan tahun 1997 telah mengingatkan kita pada persoalan kemiskinan. Sejauh ini, upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan, baik melalui proyek Inpres Desa Tertinggal (IDT) maupun pembangunan keluarga sejahtera di daerah tidak tertinggal untuk mengurangi kemiskinan absolut dan relatif. Namun, tingginya tingkat inflasi yang menyertai krisis ini tampaknya akan memperbesar jumlah penduduk yang dikategorikan miskin. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan masih merupakan agenda penting yang harus dipecahkan.

Pada masyarakat pedesaan, telah lama diketahui bahwa persoalan kemiskinan dan kesejahteraan terkait dengan perubahan struktur perekonomian desa, dari pertanian ke non-pertanian. Tersedianya kesempatan kerja nonpertanian dan akses terhadap kegiatan produktif mempunyai arti penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa atau paling tidak dalam strategi kelangsungan hidup rumah tangga miskin di pedesaan. Melalui kesempatan kerja yang ada, khususnya nonpertanian, rumah tangga miskin pedesaan berusaha memaksimalkan jam kerja dan tenaga kerja untuk meningkatkan pendapatannya, di samping upaya penghematan pengeluaran. Dalam proses ini modal dan pendidikan merupakan faktor produksi yang secara kompetitif menentukan pencapaian kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sementara itu, pendekatan kelompok yang dipakai dalam upaya pengentasan kemiskinan dalam program IDT dan pengembangan keluarga sejahtera tampak menghadapi kendala yang cukup serius seperti terungkap pula bahwa lembaga tingkat desa yang ada belum

berfungsi secara memadai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Isu seputar pekerja anak juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan umum kemiskinan. Berawal dari keterlibatan anak dalam pekerjaan mencari nafkah karena kemiskinan yang kemudian diperburuk oleh lemahnya perlindungan kerja mencerminkan kompleksitas masalah pekerja anak. Dengan mengambil kasus pekerja anak di jermal, diketahui bahwa ketiadaan perlindungan atas hak-hak pekerja anak telah memiadakan juga kontribusi ekonomi yang diharapkan dari pekerjaan mereka. Artinya, kemiskinan tidak juga dapat dientaskan dengan cara mempekerjakan anak.

Kemiskinan tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan ekonomi dan akses terhadap kegiatan produktif. Dalam konteks *quality of care* terungkap bahwa hak-hak konsumen keluarga berencana belum sepenuhnya terpenuhi. Kesadaran konsumen untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dan hak-hak atas pelayanan KB yang berkualitas masih harus berhadapan dengan miskinnya informasi dan layanan yang aman dan berkesinambungan dari pihak *provider*. Tanpa layanan yang berkualitas, hal ini akan mendorong munculnya berbagai permasalahan sosial lain, seperti *surplus labor* yang akan memperumit persaingan mengakses kegiatan produktif ataupun munculnya *unwanted pregnancy* yang akan mendorong terjadinya aborsi. Aborsi adalah sebuah tragedi lain yang menonjol di penghujung tahun 1997. *Populasi* edisi ini menyoroti berbagai hal yang berkaitan dengan proses dan pemecahan masalah kemiskinan, hak-hak konsumen keluarga berencana, dan kontroversi aborsi.